



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 453500

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

1. Tanah Seluas 453 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 271.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/140 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 661.500.000
3. Tanah Seluas 1643 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 346 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. Tanah Seluas 986 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000

Rp. 1.069.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, HONDA NF/125 D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 9.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 52.167.863

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.421.067.863

III. HUTANG

Rp. 119.739.785

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.301.328.078

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.